PROFIL GEREJA DI MASYARAKAT INDONESIA

Wawancara Majalah Orientasi Baru dengan Bapak Uskup Agung Jakarta, Mgr. Leo Soekoto S.J. dan Sekretaris Eksekutif KWI, Mgr. Valentinus Kartosiswoyo Pr.

Sehubungan dengan tema terbitan tahun 1993, Redaksi Majalah ***Orientasi Baru*** *ingin mengadakan wawancara dengan Bapak Uskup dan Monsignore mengenai Jatidiri Kristiani. Secara umum kami ingin bertanya: Bagaimana hidup sebagai orang Kristen dewasa ini?*

Kami berpangkal dari hipotesa, bahwa iman baru menjadi nyata kalau dihayati secara pribadi dalam pergumulan hidup yang jujur dan dalam keterbukaan hati kepada Allah yang memanggil setiap orang secara pribadi. Di lain pihak iman mengikuti Kristus baru disebut kristiani kalau setia kepada Kristus sebagaimana diwartakan oleh gereja sepanjang tradisi. Dengan lain kata hidup orang kristen dewasa ini ada pada persimpangan antara tradisi dan penghayatan pribadi.

Di dalam rangka hipotesa ini kami mempunyai beberapa permasalahan yang lebih menyangkut praksis hidup orang kristen dan jemaat, misalnya di bidang moral, ibadat, pembangunan jemaat, keterlibatan sosio politik dan lain-lain. Untuk itu kami mengharapkan dari Bapak Uskup dan Monsignore sekedar pengarahan praktis: pokok-pokok manakah yang perlu kami perhatikan kalau kami melanjutkan penelitian kami tentang jatidiri kristiani itu?

Tapi perkenankanlah kami terlebih dahulu bertanya, bagaimanakah kesan sepintas Bapak Uskup dan Monsignore tentang jatidiri kristiani itu?

Mgr. Leo Soekoto: Jatidiri kristiani sebagai *das Sollen* berlaku sepanjang masa dan di mana saja. Sebagai *das Sollen,* jatidiri kristiani itu adalah mengasihi Allah dengan segala kekuatan dan di atas segala-

galanya, sekaligus mengasihi sesama bukan hanya seperti diri sendiri melainkan seperti Kristus telah mengasihi kita, artinya mengasihi sampai mengorbankan kepentingan diri bahkan sampai mengorbankan nyawa sendiri. Dimensi sosial dari jatidiri itu ialah menjadi garam dan terang dunia.

Substansi yang terkandung dalam jatidiri itu tetap tapi perwujudannya bisa berubah-ubah tergantung dari jamannya. Dulu umat mewujudkan penghayatan jatidiri itu dalam rangka ketaatannya pada peraturan gereja. Sekarang mereka mewujudkannya dalam rangka partisipasinya dalam gereja. Dulu pengamalan jatidiri itu diwujudkan dengan pewartaan Injil yang bertujuan untuk menerimakan sakramen baptis. Sekarang pengamalan itu diwujudkan dengan keikutsertaan umat dalam memperjuangkan nilai-nilai manusiawi seperti keadilan, perdamaian dan kerukunan.

Dasar gagasan di atas adalah ajaran *Gaudium et Spes*. Di sana eksistensi gereja dan dunia tidak dipikirkan dalam rangka dualisme, melainkan dalam rangka inkarnasi. Rahmat tidak diberikan sebagai tambahan atau hadiah kepada kemanusiaan, melainkan menghidupkan apa yang sudah ada dalam diri manusia sendiri. Maka tugas gereja bukan pertama-tama menciptakan kekhasan atau keeksklusifan yang baru melainkan ikut berpartisipasi memelihara dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada, seperti keadilan, kerukunan dan perdamaian.

Tugas khas gereja adalah memberikan intensitas pada perjuangan humanisme itu. Harap diingat, humanisme sendiri juga bisa sangat intensif. Agar kita tidak terjerumus pada perjuangan humanisme semata-mata, kita, sebagai orang kristen, masih berkewajiban untuk menegaskan dan menampilkan dimensi transendens dari perjuangan nilai-nilai manusiawi itu.

Sehubungan dengan itu, kita harus sadar, bahwa semua yang kita hayati dan amalkan itu bukan sekedar mengandalkan kekuatan sendiri melainkan berdasarkan keagungan dan belas kasih Tuhan seperti terungkap dalam doa ini: *God, our Creator, how wonderfully you made man. You transformed dust into your own image, and gave it a share in your own nature; yet you are more wonderful in pardoning the man who has rebelled against you. Grant that where sin has abounded, grace may more abound, so that we can become holier through forgiveness and be more grateful to you.*

Kesadaran akan belas kasih Tuhan ini penting untuk kita sadari sebagai bagian dari jatidiri kita. Karena kesadaran itu kita bisa senantiasa

mempunyai harapan dan bangkit dari kegagalan perjuangan kita, kesalahan dan dosa-dosa kita.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Sulit bagi kita untuk membicarakan identitas katolik secara umum. Masing-masing anggota umat, atau masing-masing kelompok dalam umat berada dalam kondisi dan latar belakang historis yang berbeda satu sama lain. Belum lagi adanya bakat yang berbeda-beda pula.

Karena itu kadar kekatolikan umat kita sangat bervariasi. Ada kelompok yang sudah merasa katolik, jika mereka sudah membangun keluarga baik dan tentram serta rajin pergi ke gereja. Tapi ada juga kelompok – meskipun kecil dan baru saja tumbuh – yang tidak puas dengan kakatolikan macam itu. Kelompok ini ingin memperjuangkan dan mewujudkan nilai-nilai kristiani dalam hidup real bermasyarakat. Kita bisa menyebut mereka sebagai "kelompok katolik *advanced*". Kelompok ini kiranya mempunyai arah keprihatinan yang sesuai dengan keprihatinan gereja masa kini.

Meskipun demikian, saya tidak mau mengatakan, bahwa kelompok pertama di atas bukanlah kelompok katolik yang kurang baik. Kita harus menerima bahwa kesadaran mereka baru sampai di situ. Kita bisa terjerumus ke dalam suatu utopi, jika kita beranggapan, bahwa dalam waktu dekat kekatolikan yang "minimal" itu bisa kita hilangkan. Malahan pada kelompok-kelompok tertentu, kita tidak bisa menuntut mereka berbuat lebih. Kelompok petani misalnya, apalagi yang bisa kita tuntut dari mereka, jika mereka sudah berhasil membangun keluarga yang tentram, sejahtera dan rukun dengan tetangga di desa mereka?

Di samping itu patut juga diingat, bahwa "kekatolikan minimal" itu juga sangat perlu. Sebelum kita aktif memperjuangkan nilai-nilai kristiani, kita toh perlu membangun keluarga katolik yang sehat dan baik dalam hal kereligiusan maupun moral. Jadi kita tidak bisa menyeragamkan kekatolikan yang ada pada umat. Tugas pastoral kita hendaknya dirincikan sesuai dengan variasi kelompok yang ada.

Tanya: *Sekarang perkenankan kami menanyakan tentang jatidiri kristiani itu dalam rangka praksis hidup orang katolik. Kami mulai dari bidang moral dan kami mengambil contoh* ***abortus****. Tak kuranglah pengarahan gereja dalam hal abortus. Tak kurang pula dokumen tertulis di sekitar masalah itu. Tapi dalam praktek hidup nyata, orang katolik harus ikut dalam dan mentaati politik yang hendak menangani masalah*

ledakan penduduk dengan cara yang tak disetujui gereja. Dan di tengah-tengah pelbagai desakan akhirnya seorang ibu katolik harus mengambil keputusan sendiri, yang bagaimana pun juga "serba salah", tanpa ditemani siapa pun jua. Bukankah pengarahan moral gerejani selalu bersifat umum, tidak pernah bersifat individual, padahal masalah moral selalu bersifat khusus dan individual. Bapak Uskup dan Monsignore, apakah yang harus kami perbuat supaya pengarahan moral gerejani to the point?

Mgr. Leo Soekoto: Pengarahan moral oleh gereja dalam bentuk ajaran hierarki memang tidak bisa lain kecuali bersifat umum. Keuskupan setempat dan para gembalanya masih harus membuat pengarahan itu lebih sesuai dengan keadaan setempat dan kepentingan individu. Jadi gereja tak mengecualikan pengarahan moral yang *to the point.* Dalam hal ini gereja menghargai individu sungguh sebagai pribadi dan bukan sekedar mesin, yang bisa begitu saja taat. Karena itu individu-individu, yang merasa tak tersapa oleh pengarahan umum, dapat selalu membicarakan problemnya dengan gembala mereka. Memang pengarahan moral yang *to the point* mengandaikan adanya partisipasi dari individu yang bersangkutan.

Karena keterbatasan tenaga dalam pelbagai hal lain, kita tentu tidak bisa mendampingi secara tuntas individu-individu dan permasalahannya. Tapi di Keuskupan Agung Jakarta kami mencoba mendekatkan diri pada pengarahan yang *to the point* itu, yakni dengan mengadakan kerasulan kategorial. Ada banyak kelompok kategorial yang coba kami layani, seperti kelompok wartawan, seniman, pemulung, dan buruh. Ada juga kelompok orang-orang buta. Bahkan baru-baru ini muncul sebuah kelompok *meeting at lunch.* Kelompok ini beranggotakan pemudi-pemudi yang terpaksa memberikan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Salah satu tujuan dari kelompok ini adalah memberikan kemungkinan bagi anggotanya untuk memikirkan dan mencari jodoh. Maklum, karena kesibukan kerjanya, mereka kurang memperhatikan hal tersebut. Di samping itu juga muncul kelompok *"singles for God".*

Pendampingan bagi kelompok-kelompok ini tidak berasal dari atas atau dari luar, tapi dari mereka sendiri. Para gembala hanya bertugas untuk memberi inspirasi. Dengan pendekatan kategorial ini, kita makin mendekatkan diri pada ideal pengarahan *to the point.* Hidup dan permasalahan mereka sekurang-kurangnya dapat lebih kita kenal dalam rangka kategori kelompok mereka. Untuk memberi ilham dan inspirasi

bagi mereka tidak cukup hanya dengan berkotbah. Kita harus mengusahakan dialog dengan mereka.

Sebagai uskup, saya selalu berusaha untuk menemukan kesempatan dialog itu dalam kunjungan-kunjungan ke paroki. Di sana saya mengenal pelbagai problem yang tak saya bayangkan sebelumnya. Dan dari sana saya tahu, bahwa tak cukuplah jika seorang uskup itu hanya rajin menulis surat gembala. Kalau kita tak mengenal lapangan sering kita menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak ada.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Kelompok-kelompok yang bervariasi jelas memerlukan pendampingan dan pelayanan pastoral maupun moral yang bervariasi pula. "Kelompok katolik *advanced*" misalnya, mereka ini kiranya tidak bisa lagi dilayani secara tradisional. Juga dalam hal moral tidak tepat lagi jika mereka ini hanya dikotbahi dan diajari. Kita justru perlu berkonsultasi dan bekerjasama dengan mereka dalam menangani masalah-masalah moral yang mereka hadapi.

Di samping masalah itu, saya sendiri melihat ada dua hal pokok yang perlu mendapat perhatian kita, yakni masalah kesetiaan dalam keluarga dan keadilan. Umum diketahui, bahwa kini banyak keluarga, juga keluarga-keluarga katolik dilanda semacam krisis kesetiaan antara isteri dan suami, atau antara suami dan isteri. Untuk ikut mengurangi masalah ini, kita perlu mendalami kembali arti kesetiaan, misalnya lewat kotbah dan persiapan perkawinan.

Sementara itu sungguh memprihatinkan, bahwa banyak orang katolik tidak lagi memperhatikan norma keadilan. Di kamar pengakuan misalnya hampir tak pernah terdengar orang mau mengakukan soal-soal di sekitar korupsi, walaupun orang tahu, bahwa orang katolik pun tidak bersih dari soal ini.

Dalam hal abortus perlu saya katakan, memang ada jurang antara pengetahuan dan ajaran di satu pihak dan praktek di lain pihak. Orang tahu bahwa hal itu tidak boleh, toh orang itu mempraktekkan abortus. Sering alasannya hanyalah bersifat kultural dan sosiologis, misalnya karena rasa malu baik dari dirinya sendiri maupun dari keluarga.

Tanya: *Di bidang ibadat, mengenai* ***liturgi, doa*** *dan* ***kehidupan rohani****. Sekarang umat ramai-ramai menghayati bentuk-bentuk kehidupan rohani yang menghangatkan, merindukan praktek-praktek liturgis yang tidak konvensional, ikut dalam gerakan karismatik, karena gerakan ini bisa menyegarkan jiwa. Seiring dengan penghayatan yang tidak konvensional itu, berjalan liturgi gerejani yang baku, kering dan*

tidak hidup. Umat menerima itu sebagai kewajiban. Hanya kalau mungkin, mereka mencari alternatif lain. Bapak Uskup dan Monsignore, bagaimanakah pembaharuan liturgi supaya tanggap terhadap kebutuhan umat?

Mgr. Leo Soekoto: Kalau kita ingin jujur, janganlah kita mudah hanyut dengan kritik atau protes kelompok minoritas dalam gereja yang mungkin dibawakan oleh orang-orang yang vokal dan bergaya progresif-modern. Kita harus juga memperhatikan suara dari *silent majority*. Umat kebanyakan masih berbahagia dan terbantu oleh liturgi yang oleh pimpinan gereja, termasuk Komisi Liturgi KWI, terus menerus diamati dan diperbaharui.

Gebrakan-gebrakan dari gerakan kharismatik termasuk pengkotbah-pengkotbah atau penginjil-penginjil dari luar negeri biasanya mirip dengan petasan atau nyalanya kembang api: dahsyat tapi cepat lenyap. Banyak orang, juga dari kalangan kharismatik sendiri, mulai tidak puas, karena gerakan itu tidak bermuara pada tindakan.

Tapi dalam hal itu jangan saya ditanya, apakah saya antusias atau tidak antusias terhadap gerakan kharismatik. Pendekatan saya pada kelompok kharismatik saya lakukan dalam rangka tugas saya sebagai gembala. Saya berada bersama mereka, supaya saya bisa memberi pengarahan pada mereka. Saya tidak menari bersama mereka, karena memang saya tidak bisa menari. Saya malah menantang mereka untuk bertanya, apakah aktivitas mereka hanya membuahkan kepuasan pribadi atau membuahkan inspirasi bagi kelompok untuk membangun gereja. Saya ajak mereka untuk tidak begitu saja menerima bahwa mereka digerakkan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Mereka saya minta juga untuk kritis, jangan-jangan Roh Kudus itu hanya rekayasa mereka. Dan saya ingatkan, mereka, janganlah kita terlalu percaya akan apa yang datang dari luar negeri, jangan-jangan kita mengimpor sesuatu yang di negeri asalnya sendiri sebenarnya sudah usang.

Sudah lama kita berusaha membuat liturgi lebih erat berhubungan dengan hidup sehari-hari. Maksudnya, kita ingin agar dalam liturgi orang mengalami gema dari karya dan menerima inspirasi maupun kekuatan untuk melanjutkan karya kita sehari-hari. Dalam hal ini kiranya si pengkotbah bisa menyumbang banyak. Sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Sudah bukan rahasia, bahwa banyak umat tidak puas dengan dan mengkritik kotbah pastornya.

Memang harus diakui, banyak pastor yang tidak bisa berkotbah berdasarkan Kitab Suci. Mungkin mereka pandai mengetengahkan

kebijaksanaan manusiawi dan membicarakan hal-hal yang populer. Tapi mereka tidak bisa terjun menukik ke dalam hal yang lebih dalam, mengupas dan mengetengahkan isi kitab suci yang bisa menjadi inspirasi mengena bagi hidup sehari-hari. Dalam hal ini saya sangat terkesan akan perkataan dan pesan Romo van Kalken SJ. Katanya, "Kalau kamu kotbah, kamu harus membawa kitab suci di tangan kanan, dan koran di tangan kiri". Buat saya kata-kata itu sungguh simbolis. Saya selalu mengartikannya demikian: jika kita berkotbah kita harus berpegang pada sumbernya, yakni kitab suci, sekaligus mengetengahkan aplikasinya terhadap masalah-masalah aktual, misalnya seperti yang terbaca dari koran.

Sementara saya sungguh prihatin, bahwa kita ini sangat tidak trampil dalam menyodorkan sabda Allah secara menarik. Sebaiknya, mari kita perhatikan, bagaimana bisnis modern menyodorkan produknya. Barang sepele saja dibungkus dengan begitu menarik, diiklankan dengan sungguh-sungguh. Kalau barang itu dihadirkan secara acak-acakan dan murahan, ya tidak ada pembelinya. Misalnya, bayangkan, bagaimana jika *pizza* dibungkus dengan daun pisang? Bisa-bisa orang mengira itu bukan *pizza* tapi *getuk,* maka ia tidak akan laku. Nah, kalau kita membandingkan hal itu dengan tugas kita dalam menyampaikan sabda Allah, bagaimana kita ini bisa tega dan sampai hati menjual firman Tuhan secara murahan dan tidak menarik dalam kotbah-kotbah kita? Maka, kita harus bisa menawarkan bentuk liturgi yang menawan dan menarik. Kita harus berusaha sebisa-bisanya membuat liturgi kita ini hangat dan tidak *anyep* dan kotbah dalam liturgi itu menawan dan penuh semangat.

Namun di samping semuanya itu kita harus ingat, bahwa tujuan pokok liturgi adalah memuliakan Tuhan. Dalam hal ini harus kita akui, bahwa banyak orang kurang bisa menghayati liturgi karena hidup rohaninya dangkal. Pengenalan firman Tuhan sangat minim. Maka untuk mengembangkan liturgi kita juga perlu mengadakan pendalaman Kitab Suci. Juga kita perlu memberi dorongan agar orang dapat mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari mereka dan agar mereka terlibat dalam karya gereja. Liturgi atau ibadat apa pun yang hanya menghasilkan hura-hura rohani atau keterharuan pribadi maupun kelompok bukanlah pemujaan Tuhan.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Latar belakang studi saya adalah bidang hukum, bukan bidang liturgi. Maka kiranya bisa dipahami bila saya lebih cenderung menekankan segi hukum universal dari gereja dan kurang

memahami masalah inkulturasi. Hemat saya, seharusnya kita puas dengan empat Doa Syukur Agung yang resmi. Saya sendiri menganggap, dulu Komisi Liturgi terlalu berani. Tambahan Doa Syukur Agung lain telah menimbulkan benturan dengan gereja pusat. Saya bisa memahami jika Roma bereaksi dengan kaku dan keras. Biar bagaimana pun toh kesatuan gereja universal harus dipelihara. Di negara-negara lain Doa Syukur Agung juga hanya empat.

Mentaati hal itu tidak berarti bahwa kita tidak mempunyai peluang untuk membuat liturgi lebih hidup dan sesuai dengan kebutuhan umat. Di luar empat Doa Syukur Agung itu kita toh bisa berbuat banyak, misalnya doa pembukaan, doa umat dan doa persembahan dapat kita buat bervariasi. Belum lagi kita masih tetap bebas menyusun dan mengembangkan nyanyian-nyanyian. Dan di luar perayaan ekaristi masih banyak wilayah di mana kita bisa mengadakan pembaharuan liturgis. Saya bisa memaklumi jika umat mengalami kejenuhan liturgis. Tapi itu tidak berarti bahwa kita harus merombak liturgi kita. Saya sendiri tidak mempunyai pretensi untuk mengubah rubrik perayaan ekaristi. Masalahnya, banyak pastor tidak bisa membawakan dan menghayati dengan baik rubrik dan teks perayaan ekaristi yang tersedia. Kotbah juga tidak dipersiapkan dengan baik dan sering *ngelantur*. Saya percaya, jika teks itu kita bawakan dan kita hayati dengan baik, jika kotbah kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, umat juga akan puas.

Tanya: *Mengenai **kehidupan keluarga**. Sesuai dengan tuntutan hidup, ibu-ibu rumah tangga tak mungkin lagi membatasi tugasnya pada rumah tangga saja. Di keluarga buruh dan pegawai kecil, mereka harus ikut keluar rumah untuk membantu suami meringankan ongkos hidup berumahtangga. Di keluarga berada dan terpelajar mereka pun harus keluar rumah untuk melibatkan diri dalam tuntutan jaman. Kita sadar bahwa masyarakat kita membutuhkan keluarga "intakt", di mana orang dapat belajar berkorban karena kasih. Hanya soalnya, apakah klise katolik mengenai keluarga sebagai lingkungan yang serba harmonis, tentram, ditata oleh ibu yang tinggal di rumah dan lain-lainnya itu masih memadai dengan situasi sosial dan tuntutan keluarga intakt tadi? Apakah Bapak Uskup dan Monsignore mempunyai pengarahan supaya dalam keluarga-keluarga katolik orang dapat belajar untuk berkorban karena kasih?*

Mgr. Leo Soekoto: Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan bagian dari gereja. Keluarga yang baik harus berjasa untuk gereja maupun

masyarakat, seperti sel berjasa untuk tubuh manusia. Jadi keluarga yang baik ialah keluarga yang kecuali harmonis, tentram dan sejahtera, juga banyak sumbangannya kepada gereja mau pun masyarakat. Bagaimana bentuk sumbangan itu tentu saja tergantung dari kemampuan dan peluang yang ada bagi keluarga itu, khususnya bagi suami isteri.

Saya sangat setuju kalau di setiap keluarga, khususnya dalam keluarga yang berada, ditingkatkan pendidikan dan latihan dalam hal hidup sederhana, hidup melayani sampai mengorbankan diri sendiri. Jadi pendidikan kristiani dalam keluarga tetap perlu, kendati pelaksanaannya sulit karena situasi dan tuntutan jaman. Situasi sekarang memang lain dari dulu. Tidak hanya suami, isteri pun tidak bisa banyak hadir dalam keluarga. Anak-anak juga bisa merasa malu, kalau ibunya hanya bekerja di dapur saja. Anak-anak pun bangga jika ibunya ikut dalam banyak kegiatan dan mempunyai peran yang berarti dalam masyarakat maupun gereja. Jadi situasinya sudah berubah. Namun perubahan situasi ini tak boleh membuat kita melepaskan tujuan hakiki keluarga katolik, yaitu pendidikan anak-anak.

Maka kita harus mencari cara bagaimana pendidikan itu bisa tetap dijalankan. Pertama-tama, usaha itu harus datang dari bapak ibu sendiri. Jika kehadiran mereka bagi anak-anak secara kuantitatif sedikit, mereka harus meningkatkan dan mengintensifkan kehadiran itu secara kualitatif. Dalam kehadiran yang sedikit itu orang tua harus bisa membuat suasana sedemikian rupa, sehingga anak bisa betul-betul terdorong untuk berkontak dengan mereka.

Sementara jemaat atau lembaga pendidikan katolik harus melengkapi apa yang terpaksa kurang dalam keluarga itu. Itulah antara lain tugas sekolah katolik. Saya sendiri menggariskan, agar anak-anak katolik sebisa-bisanya ditampung di sekolah katolik. Karena itu saya berjuang mati-matian, sekurang-kurangnya untuk tingkat SD dan SMP, dua hari dari masa pendaftaran harus hanya diperuntukkan untuk anak-anak katolik terlebih dahulu.

Kurangnya kehadiran orang tua itu kiranya juga bisa diatasi dengan pastoral keluarga. Maka di paroki-paroki diadakan pendalaman kitab suci bagi anak-anak, lebih-lebih mereka yang tidak sekolah di sekolahan katolik. Juga dalam persiapan komuni pertama. Di sini orang tua diikutsertakan tidak hanya dalam upacara tapi lebih-lebih dalam persiapannya sendiri. Orang tua diminta hadir beberapa kali menjelang komuni pertama anaknya. Tujuannya, agar mereka merasa dan tahu bahwa pendidikan agama itu bukan hanya tanggung jawab gereja atau pastor tapi juga tanggungjawab mereka. Usaha membantu kelurga

katolik juga kita kerjakan lewat persiapan perkawinan. Dalam kursus perkawinan mereka juga dikenalkan pada masalah kerasulan awam, di samping masalah-masalah hidup berkeluarga.

Kita tahu, bahwa kini keluarga-keluarga katolik, seperti keluarga modern lainnya, banyak mengalami krisis, juga krisis kesetiaan. Inilah salah satu alasan, mengapa Keuskupan Agung Jakarta makin terdorong untuk memprioritaskan pastoral keluarga. Di samping Komisi Kehidupan Keluarga di tingkat keuskupan, kini juga dibentuk seksi-seksi kehidupan keluarga di tingkat paroki. Kegiatan seksi itu adalah mempersiapkan perkawinan katolik dan mengadakan *on going formation* bagi keluarga katolik. Bentuk kegiatan itu adalah pendidikan kaum muda, misalnya dalam hal pendidikan seks. Juga mengadakan rekoleksi dan konsultasi bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Dengan usaha itu terutama kita hendak membantu, agar keluarga katolik sungguh dapat mengerti tentang arti yang terdalam dari perkawinan kristen katolik. Harap diketahui, banyak orang sungguh belum mengerti apa sebenarnya hakekat dari sakramen perkawinan itu. Pengetahuan mereka lebih terbatas pada aspek insani dari perkawinan. Pengetahuan tentang arti terdalam perkawinan kristiani memang bukanlah jaminan, bahwa keluarga itu dengan sendirinya akan sanggup mengatasi masalahnya. Namun di lain pihak kita juga tahu, bahwa pengertian itu biar bagaimana pun akan membantu mereka. Dalam pengalaman, apa yang tidak dimengerti itu biasanya juga tidak dipikirkan dan tidak dipertimbangkan.

Pengertian yang saya maksudkan di sini bukan hanya pengertian yang mencakup intelek tapi juga pengertian yang menggerakkan hati. Para gembala hendaknya bisa menanamkan pengertian macam itu. Maksud saya, lewat kotbah-kotbah mereka, mereka perlu mengisi intelek bagaikan mengisi accu. Tapi accu saja tidak cukup. Para gembala itu masih perlu membantu agar umatnya juga bisa menggelindingkan roda kehidupan mereka, juga kehidupan keluarga. Yang terakhir ini kiranya lebih menyangkut gerak hati daripada kemampuan intelek.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Memang pola hidup keluarga tradisional, di mana ibu di rumah dan bapak mencari nafkah, sudah tidak dapat lagi mengimbangi tuntutan jaman. Untuk memperkuat ekonomi keluarga, si ibu juga harus bekerja. Bahkan banyak isteri merasa kesepian dan mengalami kekosongan hidup, jika ia tinggal di rumah saja. Apalagi jika anak-anak sudah bersekolah.

Tapi kenyataan ini hendaknya jangan dijadikan dalih untuk mengurangi kehadiran dalam keluarga. Dan hemat saya, tak ada kebijaksanaan umum yang bisa mengatur kehadiran tersebut. Sejauh mana kehadiran itu cukup, dan sejauh mana kehadiran itu tidak cukup, itu semuanya tergantung dari kebijaksanaan masing-masing keluarga. Dalam hal ini pastor perlu mengingatkan terus menerus tentang pentingnya kehadiran itu. Saya tahu, dalam keadaan demikian sangat sulit menanamkan nilai-nilai katolik bagi pendidikan anak. Doa bersama saja sulit dipraktekkan. Sekali lagi, keluarga itu sendirilah yang bisa menemukan *modus vivendi*-nya masing-masing. Gereja paling-paling bisa membantu dalam persiapan perkawinan dan mengajak mereka untuk selalu mengevaluasi hidup perkawinan mereka.

Tanya: *Sambil lalu mengenai* ***kawin campur****, tapi masalahnya sebenarnya lebih mendalam. Umat katolik hidup dalam masyarakat yang pluralis. Di sanalah mereka harus menjadi "ragi". Hanya dengan mencampur orang bisa menjadi "ragi". Sementara banjak orang katolik dan pemimpin-pemimpin gereja berpendapat, bahwa iman katolik harus dilindungi dalam lingkungan katolik, maka jangan kawin campur dan lain-lainnya! Bagaimana perasaan Bapak Uskup dan Monsignore?*

Mgr. Leo Soekoto: Memang ada orang yang mau membela bahkan mempromosikan kawin campur dengan kedok ragi masyarakat, bahkan kedok ekumene. Dalam pengalaman dan kenyataan, cita-cita macam itu hanya utopi. Dari statistik terbaca, bahwa banyak orang katolik tidak bisa merasul dan menjadi ragi dalam perkawinan campur. Sebaliknya mereka malah "dirasuli" dan kehilangan imannya. Maka perkawinan campur harus tetap kita hindari sedapat mungkin, meski pun kita hidup dalam masyarakat pluralis. Karena perkawinan bukanlah hanya lembaga untuk hidup bersama. Lebih dari itu, dalam perkawinan pria dan wanita harus menjadi satu daging, artinya mengintegrasikan pribadi mereka satu sama lain sampai mereka bersatu dalam cita-cita dan dalam karya, singkatnya dalam hidup. Hal ini lebih mudah dimengerti kalau kita ingat bahwa perkawinan antara dua orang kristen adalah sakramen, artinya kesatuan dalam perkawinan adalah kesatuan segitiga: suami – isteri – Kristus.

Menurut pendapat saya, penyebab banyaknya perkawinan campur bukan pertama-tama pluriformitas masyarakat, melainkan banyak orang katolik kurang menyadari bahwa agama mempunyai peran yang sangat menentukan dalam perkawinan, khususnya dalam proses ber-

satunya suami – isteri dan dalam *policy* pendidikan anak. Maka untuk mengurangi jumlah perkawinan campur, jauh-jauh sebelum berpacaran anak-anak kita harus sudah diberitahu apa artinya perkawinan katolik sebagai sakramen dan apakah seharusnya peranan agama dalam hidup perkawinan dan berkeluarga. Sekali lagi saya ulangi di sini apa yang sudah saya katakan di atas tadi: betapa pentingnya kita menanamkan pengertian yang menggerakkan hati tentang kehidupan berkeluarga.

Tapi patut ditekankan, larangan kawin campur itu jangan sekali-kali mengecualikan pelayanan dan pendampingan kita bagi mereka yang sudah terlanjur kawin campur. Mereka ini janganlah disingkiri, tapi didekati, dan sejauh mungkin dilibatkan dalam kegiatan paroki.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Hukum di sekitar kawin campur adalah hasil dari proses pengalaman dan percobaan yang sangat lama. Hal itu sudah dibahas menjelang Konsili Vatikan II. Sementara Konsili Vatikan II sendiri tidak berhasil meraih kesepakatan untuk legalisasi perundang-undangannya. Sidang meminta Sri Paus untuk membuat perundang-undangan itu. Tapi Paus tidak bersedia, sebelum rencana perundangan itu dicoba dalam tingkat bawah. Akhirnya baru larangan kawin campur itu disahkan dalam Kodex tahun 1983. Jadi tidak tepat, jika larangan kawin campur itu dianggap sebagai produk konservatisme gereja. Larangan kawin campur itu adalah hasil yang ditimba dari pengalaman dan *try-out* yang cukup lama. Larangan kawin campur sebenarnya tak perlu dikaitkan dengan sikap isolatif dari gereja.

Dari pengalaman jelas terbukti bahwa dalam kawin campur pihak katolik ternyata tak berhasil menjadi garam. Sebaliknya, iman pihak katolik jadi luntur. Jadi dalam interaksi kawin campur itu, pihak katolik kalah. Hanya sebagian kecil orang katolik dapat bertahan. Itu adalah fakta, yang tak dapat diteorikan. Tugas penggembalaan harus bertolak dari fakta itu.

Sementara patut dikatakan, bahwa dalam hal larangan kawin campur gereja kita memang harus berhadapan dengan kontradiksi. Di satu pihak, kita menghormati hak asasi dan kemerdekaan seseorang untuk memilih. Di lain pihak, kita melarang orang menggunakan kemerdekaan itu dalam memilih calon hidup yang berbeda agama. Di satu pihak, kita menghargai *libertas religiosa,* di lain pihak kita melarang upacara ganda dalam melaksanakan perkawinan. Jadi secara teoritis, larangan kawin campur itu memang mengandung kontradiksi. Kalau gereja memberlakukan larangan kawin campur, pembenaran larang-

an itu memang tidak dapat ditemukan dalam dan disandarkan pada teori, melainkan dalam dan dari praktek. Dalam praktek terbukti, bahwa pihak katolik sulit mempertahankan imannya, meski ia sudah dipagari dengan pelbagai ketentuan dan janji untuk mempertahankan imannya.

Tanya: *Mengenai **sakramen tobat.** Di sini pun masalahnya kiranya bukan sekadar pengakuan dosa. Banyak orang masih mengaku dosa, apalagi menjelang Natal dan Paskah. Tujuan mereka terutama adalah pendamaian dengan Tuhan, dengan dirinya dan sesama. Dan liturgi sakramen tobat dewasa ini juga mengarah ke sana. Sementara itu ada umat yang berpendapat, lebih baik aktif dalam usaha perubahan sosial daripada mencari pendamaian batin saja. Dan pada umumnya dapat dipertanyakan, apakah tugas pembaharuan gereja terbatas pada pembaharuan batin saja? Dalam tradisi Perjanjian Baru, tobat dikaitkan dengan pewartaan Kabar Gembira bagi dunia. Bapak Uskup dan Monsignore, apa yang harus dibuat, supaya dengan sakramen tobat jemaat kristen menjadi agen perubahan?*

Mgr. Leo Soekoto: Banyak orang mengartikan istilah tobat dengan sangat sempit, yakni menyesali dosa yang sudah diperbuat dan kadang-kadang memang masih ditambah dengan janji, bahwa tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Ada satu hal yang kurang diperhatikan, yakni aspek positif dari pertobatan. Bertobat juga berarti kembali kepada Tuhan *(conversio ad Deum)*, kembali ke jalan Tuhan, kembali mengikuti Yesus Kristus untuk berbuat baik, untuk berjuang membangun kerajaanNya di tengah masyarakat. Jadi bertobat artinya bukan hanya "perdamaian dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri dan sesama", melainkan juga kembali berjuang bagi Tuhan, bagi keselamatan diri sendiri dan kesejahteraan manusia. Dua-duanya penting, yaitu "pembaharuan batin" dan "pewartaan kabar gembira".

Dengan pengertian tobat yang demikian, sakramen tobat akan membuat kita menjadi orang yang penuh kedamaian dan sekaligus menjadi agen perubahan, pembaharuan dan kemajuan. Dalam hubungan ini, baik kalau orang yang melakukan dosa berat diberi penitensi yang ada artinya bagi orang lain. Justru dengan pengertian tobat yang demikian itu, pertobatan juga tidak bisa dihubungkan melulu dengan pengakuan dosa saja. Pertobatan itu harus menjadi tugas hidup, terus menerus. Kadang-kadang pertobatan itu harus diberi aksentuasinya, misalnya dengan penerimaan sakramen tobat menjelang Paskah dan

Natal. Dengan pengertian tobat macam itu, kiranya kita juga tidak perlu mengeluh, bahwa kita kekurangan pastor untuk pengakuan dosa pribadi. Perlu saya tambahkan, keluhan itu sebenarnya ironis, karena kini banyak umat enggan mengaku dosa dan pastor kurang berusaha untuk membangkitkan gairah umat untuk mengaku dosa. Jadi sebenarnya malah banyak pastor yang kekurangan pengakuan dosa.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Untuk sementara nampaknya kita harus puas dengan sakramen tobat yang sekarang ini dipraktekkan. Alasannya benar-benar praktis. Jumlah imam tak memadai sama sekali dibanding dengan jumlah umat yang harus dilayani dalam sakramen tobat. Bagaimana seorang imam dapat menjalankan pelayanan sakramen tobat secara efektif bagi 5000 umatnya? Apalagi jika orang mengharap, agar sakramen tobat itu bukan sekedar pengakuan dosa, tapi suatu bimbingan yang menyebabkan pertobatan personal secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. Yang terakhir ini tentu membutuhkan banyak waktu. Jadi untuk mengidealkan pelayanan sakramen tobat, seharusnya Tuhan perlu memanggil lebih banyak imam. Tapi mana mungkin?

Sayangnya, kondisi di atas oleh banyak imam dijadikan dalih untuk mengesampingkan pelayanan sakramen tobat. Kecuali menjelang Natal dan Paskah, pelaksanaan sakramen tobat menjadi sangat jarang. Dulu ada kebiasaan untuk mengaku pada hari Sabtu. Sekarang tidak lagi, apalagi pada hari Sabtu imam harus merayakan perayaan ekaristi. Dari pengalaman saya tahu, bahwa bagi kebanyakan orang pengakuan dosa itu tidaklah efektif. Mereka menjalankan sebagai kewajiban rutin. Hanya beberapa yang sungguh bisa tertolong oleh pengakuan dosa. Sebenarnya gereja sendiri toh tidak mewajibkan orang mengaku dosa, kecuali bagi mereka yang melakukan dosa berat.

Meskipun demikian, hemat saya, pengakuan pribadi itu tetap perlu, sekurang-kurangnya untuk pendidikan hati nurani. Saya sadar, bahwa kita tidak dapat memperoleh pendidikan hati nurani yang maksimal, jika kita hanya menyandarkan diri pada praktek sakramen tobat seperti yang sekarang dijalankan. Absolusi bersama juga tidak memecahkan masalah ini. Maka pendidikan hati nurani itu harus dijalankan dalam kesempatan lain, misalnya dalam rekoleksi dan perayaan tobat. Apa yang tak dapat diraih dengan pelayanan sakramen tobat hendaknya diraih dengan rekoleksi dan retret itu.

Tanya: *Mengenai **sekolah katolik**. Sekolah katolik bertujuan untuk memberikan pendidikan katolik, khususnya pada anak-anak katolik.*

Tujuan berikutnya, anak-anak dari sekolahan katolik diharapkan menjadi orang yang cerdas sekaligus dapat memberikan sumbangan dan keprihatinan sosialnya bagi masyarakat. Entah karena alasan politik pendidikan pemerintah, entah karena alasan ekonomis kerumahtanggaan sekolah, entah karena salah kita sendiri, kedua cita-cita itu nampaknya tak berjalan dalam praktek; malahan banyak sekolah katolik menyimpang dari cita-cita tersebut. Bapak Uskup dan Monsignore, mengapa kita masih perlu mempertahankan dengan gigih sekolah-sekolah katolik kita?

Mgr. Leo Soekoto: Saya memang gigih mempertahankan pendapat saya, bahwa sekolah katolik itu mutlak perlu. Sekolah katolik bukan hanya tempat untuk memberikan pendidikan ilmu tetapi juga iman, bukan hanya tempat untuk menyiapkan orang-orang yang mempunyai kepri-hatinan bagi masyarakat, tapi juga tempat untuk menyiapkan orang-orang yang mencintai gereja dan suka mengambil bagian dalam karyanya. Memang sekolah katolik kita belum sempurna dan banyak kekurang-annya. Tapi mengapa kita mesti harus sempurna? Saya pikir, lebih baik ada sekolah katolik meski tidak sempurna, daripada tidak ada sama sekali.

Kita tidak boleh meragukan manfaat sekolah katolik, apalagi jika kita mengingat semakin banyak orang tua yang terpaksa kurang bisa hadir di tengah keluarganya. Seperti sudah saya katakan di atas, seko-lah katolik dapat memerankan diri sebagai pembantu keluarga dalam hal pendidikan. Kalau kita tidak percaya, coba saja menutup sekolah-sekolah katolik yang belum dan tidak akan sempurna itu, nanti pasti akan banjir protes dari keluarga-keluarga katolik, bahkan tidak mustahil juga dari keluarga-keluarga bukan katolik yang telah mencicipi atau mendengar tentang pendidikan di sekolah-sekolah katolik.

Saya sangat menganjurkan kepada keluarga-keluarga katolik, supaya anak katolik bersekolah di sekolah katolik. Saya menganjurkan pula kepada sekolah-sekolah katolik, supaya mereka sedapat mungkin menerima anak-anak katolik, paling tidak di tingkat sekolah dasar. Sebab, apa yang diajarkan kepada anak-anak dan apa yang mereka alami pada masa kecil dan remaja akan sangat mempengaruhi pertumbuhan mereka selanjutnya.

Saya bisa menerima, jika sekolah katolik dikritik sebagai sekolah yang terlalu elit dan mahal. Tapi kita tidak boleh meng-*gebyahuyah*, seakan semua sekolah katolik adalah demikian. Banyak sekolah katolik

terbuka untuk mereka yang miskin. Tapi saya juga maklum, di beberapa wilayah ada sekolah katolik yang tak bisa menghindarkan diri untuk menjadi elite dan mahal. Karena mutunya, sekolah demikian malah dicari oleh orang kaya. Kita tidak perlu menutup kemungkinan ini, karena sebagai terang dunia, gereja lewat sekolah katolik pun perlu melayani mereka yang berada. Begitulah realita sekolah katolik, dibenci sekaligus disayangi, dijauhi sekaligus didekati. Tapi biar bagaimana pun saya sendiri selalu menganjurkan, agar sekolah katolik yang elit dan mahal juga terbuka untuk mereka yang miskin.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Hemat saya, sekolah katolik itu mutlak perlu. Pemerintah sendiri menjamin eksistensi sekolah katolik. Memang sekolah katolik sebagai sarana kristenisasi sudah bukan jamannya. Tapi sekolah katolik itu tetap berguna untuk memelihara iman anak-anak katolik. Seandainya tidak ada sekolah katolik, saya tidak berani menjamin, apakah iman anak-anak kita bisa dipelihara di sekolah lain. Apalagi jika kita memperhitungkan faktor offensif dari luar yang hendak menggoncangkan iman itu.

Saya juga tidak mau mengadili sekolah-sekolah katolik yang elit. Sebab, pertama, gereja sendiri toh menghendaki, agar sekolah yang kita dirikan unggul dalam mutu. Kedua, *de facto* gereja sendiri jadi mempunyai pamor dan disegani, justru karena mutu sekolah-sekolah tersebut. Ketiga, sekolah-sekolah katolik elit itu masih tetap berusaha menanamkan *sensus catholicus* kepada anak-anaknya, jadi nama katolik itu bukan sekedar cap belaka. Memang ada bahaya, bahwa sekolah katolik yang elit itu lalu mengesampingkan pelayanan bagi umat yang miskin. Tapi soal ini toh bisa diatasi. Caranya, misalnya: sekolah-sekolah elit yang biasanya juga kaya itu membantu dari kelebihannya sekolah-sekolah yang lemah dan kurang punya di keuskupan mereka.

Tanya: *Mengenai **pengusaha katolik**. Tak perlu disangkal, bahwa pengusaha katolik sangat sosial bagi "keuangan" gereja. Tapi di perusahaan-perusahaan, mereka "terpaksa" bekerja seperti yang lain, yakni mencari keuntungan ekonomis dengan memanfaatkan tenaga kerja yang murah. Bapak Uskup dan Monsignore, apa yang dapat dibuat oleh paroki-paroki kita, agar usahawan katolik menjadi lebih terlibat dalam pergumulan sosial?*

Mgr. Leo Soekoto: Pernah suatu kelompok pengusaha katolik minta ceramah yang judulnya "untung di sini untung di sana". Maksudnya,

bagaimana bisa mendapat untung dalam usahanya dan kemudian toh masih boleh masuk surga. Sekurang-kurangnya, mereka itu toh tidak hanya terbenam dalam perkara keuntungan ekonomis semata-mata, seperti banyak orang mengira.

Para uskup dan para pastor tentu saja tidak dapat memberikan petunjuk konkret yang manjur untuk memenuhi permintaan para pengusaha tadi. Yang harus berpikir dan berusaha mewujudkan idealisme tadi adalah para pengusaha sendiri. Mereka sendirilah yang harus berjerihpayah untuk mempertemukan kepentingan ekonomi perusahaan dan bantuan nyata dalam kehidupan sosial.

Hemat saya, mencari tenaga kerja yang murah tidak dilarang, asal itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah maupun keadilan sosial. Sekarang ini kita perlu senantiasa mendesak dan mengingatkan para pengusaha, agar mereka memperlakukan para pekerjanya sebagai rekan usaha, rekan kerja. Memang, keinginan itu tentu saja tidak mudah direalisasikan dalam masyarakat, di mana kekayaan berada dalam tangan kelompok kecil, sedangkan kemiskinan dan pengangguran yang sangat besar jumlahnya ada dalam mayoritas masyarakat.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Jangan menyeragamkan, bahwa pengusaha-pengusaha katolik mau membantu gereja hanya dalam hal keuangan dan dana. Sesungguhnya, banyak dari mereka yang mempunyai cita-cita, bagaimana mereka dapat membantu gereja dan negara untuk mengadakan perubahan secara lebih struktural. Sementara keinginan mereka ini tak bisa begitu saja diwujudkan karena kondisi dan situasi dewasa ini. Cita-cita untuk memberi upah yang adil menurut *Rerum Novarum* misalnya menjadi tidak realistis karena cita-cita itu menyimpang dari ukuran umum yang berlaku.

Kenyataan ini memang tidak boleh membuat kita menyerah. Kita mesti terus berusaha, sekurang-kurangnya untuk mendekati ideal yang kita inginkan. Dalam hal ini saya anggap perlu adanya moderator-moderator yang bisa mendampingi mereka. Moderator itu hendaknya mengerti seluk beluk dunia usaha, paham etika bisnis dan mendalami ajaran sosial gereja. Sebagai pribadi, moderator itu juga harus disegani dan diakui oleh dunia pengusaha katolik. Saya kira, penyediaan tenaga moderator itu perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh oleh tarekat-tarekat religius di bawah *iuris pontifici*. Terlalu berat buat uskup setempat, jika mereka dibebani dengan tugas penyediaan tenaga macam itu.

Saya yakin, moderator itu akan mempunyai banyak pengaruh. Apalagi jika kita mempunyai pusat studi khusus untuk masalah bisnis dan pengusaha. Pola yang saya pikirkan adalah pola pelayanan sektoral bagi para pengusaha. Jika ada pelayanan mahasiswa dengan moderator di dalamnya, mengapa kita tidak membuat yang sama untuk para pengusaha?

Tanya: *Mengenai **kehidupan politik**. Ada gejala, semakin politikus katolik terlibat dalam politik, semakin ia terjalin dalam sistem politik yang menghapuskan identitasnya sebagai orang katolik. Politikus itu bahkan menyembunyikan kekatolikannya, dengan alasan hanya justru dengan cara itu ia bisa ikut secara efektif dalam percaturan politik. Di lain pihak, banyak umat katolik sendiri tidak puas dengan politikus-politikus katolik itu, karena mereka menganggap, bahwa politikus-politikus itu takut menyatakan identitas katoliknya. Bapak Uskup dan Monsignore, kapan saatnya orang katolik mesti terang-terangan memperlihatkan pendirian katoliknya?*

Mgr. Leo Soekoto: Sering para politikus katolik disimak dan diadili oleh saudara-saudara seimannya dengan prinsip-prinsip moral yang terlalu keras dan main mutlak-mutlakan. Politikus katolik memang harus berbekal iman katolik, kepentingan gereja, tetapi pertama-tama ia harus memasyarakatkan nilai-nilai kristiani secara manusiawi dengan memperhatikan peluang-peluang yang tersedia. Maka mau tidak mau ia harus sering menunggu dan mencari-cari kesempatan yang baik dan cara-cara yang akan mencapai tujuan. Apa gunanya membeberkan atau memamerkan kekatolikan kalau dengan demikian tujuan yang akan dicapai justru tidak akan tercapai?

Kekatolikan bukan pertama-tama harus diperlihatkan melainkan harus dinyatakan dalam perbuatan. Tujuan berpolitik secara katolik bukanlah kejayaan gereja, apalagi kalau kita hidup dalam negara yang bukan katolik. Paling hakiki buat kita, yakni, bagaimana kita dapat menyebarkan nilai-nilai kristiani. Dalam nilai-nilai kristiani toh tercakup nilai-nilai yang oleh banyak orang dianggap sebagai nilai-nilai manusiawi, seperti saling mengasihi, saling mengampuni, keadilan, kejujuran, tepa selira, perdamaian dan lain sebagainya.

Kita umat katolik jangan suka terlalu mencurigai, mengkritik atau mengadili saudara-saudara kita seiman yang dengan kita sendiri berbeda dalam hal medan perjuangan. Sepengenalan saya, banyak politikus katolik yang sungguh berkeprihatinan memperjuangkan nilai-nilai injil,

kendati kegagalan dan situasi sulit mereka. Memang dalam berpolitik, kita tidak bisa menghadirkan semua dan apa saja yang kita yakini dan kita hayati secara imani. Tapi keyakinan itu harus tetap menjiwai apa saja yang kita lakukan. Percayalah, banyak sekali politikus katolik yang berjuang sesuai dengan keyakinan itu. Maka, kita harus saling percaya, banyak berkomunikasi satu sama lain, saling menghargai dan bertenggang rasa.

Sementara saya ingin, agar tokoh-tokoh politik jangan sampai hanya merupakan hasil "karbitan" atau *"bedogan"*. Kita harus mempersiapkan mereka, antara lain dengan kaderisasi. Tempat kaderisasi kita yang sudah tersedia dan sangat berharga adalah sekolah-sekolah katolik kita, lebih-lebih perguruan tinggi-perguruan tinggi katolik. Dan jangan lupa pula, bahwa politik yang membuahkan guna sangat besar bagi masyarakat bukanlah hanya politik tingkat tinggi di pusat pemerintahan, melainkan juga politik tingkat rendah sampai di RT dan RW.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Dalam situasi budaya, sosial dan politik di Indonesia seperti sekarang, saya bisa menerima, dan saya kira memang lebih baik, jika kita tidak perlu mengkibarkan bendera katolik dalam berpolitik. Dengan menyembunyikan identitas kekatolikan, sering kita bisa memperjuangkan nilai-nilai kristiani dan kemanusiaan dengan jauh lebih efektif. Politik sendiri selalu melihat-lihat oportunitas. Kiranya malah merugikan jika dalam situasi sekarang kita terang-terangan menyatakan kekatolikan kita dalam berpolitik.

Sehubungan dengan hal itu, kita mesti membedakan apa yang prinsipial dan apa yang bukan prinsipial. Misalnya, sama sekali tak ada relevansinya dan tak ada gunanya, bahwa kita menonjolkan identitas katolik kita dalam rembugan mengenai Undang-undang Lalu Lintas. Lain halnya jika pembicaraan menyangkut misalnya kebebasan agama, pendidikan agama dsb. Dalam hal ini kita mesti terang-terangan menyatakan sikap kita sebagai orang katolik tanpa kompromi.

Sementara harus kita ingat, bahwa berpolitik itu tidak hanya memperjuangkan kepentingan katolik tapi juga kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama, ada kalanya kita memang dituntut untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Tapi jika ada politikus katolik yang ingin terang-terangan menonjolkan identitasnya, itu pun baik untuk diterima.

Tanya: *Mengenai para* ***imam****. Untuk sampai menduduki jabatan pimpinan, kaum awam biasanya harus melalui jenjang-jenjang karir, yang harus dititinya dari bawah. Sebaliknya, tanpa pengalaman meniti*

karir kepemimpinan, dan tanpa bukti praktis bahwa mereka bisa mengkomunikasikan iman, para imam itu langsung menduduki jabatan kepemimpinan dalam gereja sebagai paguyuban komunikasi iman. Kendati kaum awam tidak puas, dan kendati imam banyak menimbulkan persoalan bagi umat, toh kaum awam selalu dapat "memaafkan" dan "menyelamatkan" imam dalam rangka sistem gerejani. Lebih karena sistem (institusi hirarkis) dan bukan karena kualitas imam itu sendiri, umat bisa menerima kepemimpinan imam. Adakah sebenarnya bentuk atau wujud hidup gereja yang lebih kolegial, di mana umat bisa mengembangkan dan mewujudkan daya kritisnya? Apakah Bapak Uskup dan Monsignore bisa memberi arah dalam hal itu?

Mgr. Leo Soekoto: Imam adalah gembala, bukan pejabat. Tugas imam bukan membentuk karir, melainkan melaksanakan tugas. Dan tugas itu bukan sesuai dengan hobi – bahkan mungkin saja tidak sesuai dengan keahliannya – melainkan sesuai dengan perintah atasannya, demi kebutuhan umat dan masyarakat. Memang banyak imam tidak memenuhi selera, harapan atau tuntutan umat. Yang paling menyadari hal itu seharusnya adalah para imam sendiri.

Dalam hal ini saya menyarankan pentingya *ongoing formation.* Saya berpendapat, seminari tidak bisa disalahkan dengan tuduhan, bahwa pendidikannya tidak menghasilkan imam yang layak. Tidak mungkin bagi seminari untuk dapat menyediakan imam yang tetap akan segar selama sepuluh tahun. Masalahnya kembali pada *ongoing formation* dari para imam sendiri. Jika tetap ingin segar dan *up to date* bagi tuntutan jaman, *ongoing formation* itu mutlak perlu bagi para imam. Dalam dunia modern, siapa saja, dokter, manager, pengusaha dan sebagainya tak bisa lepas dari *ongoing formation* itu, imam pun kiranya tidak boleh mengecualikan diri dari tuntutan itu.

Saya sangat mengharap, bahwa seminari dapat mendidik orang yang mau belajar sendiri. Lulus ujian itu perlu, tapi lebih perlu lagi adalah mental yang selalu siap untuk memenuhi tuntutan *ongoing formation* bagi diri si seminaris setelah ia lulus. Saya mengharap, imam lulusan seminari itu adalah imam yang mau senantiasa membaca dan berani membaca bukan sekedar majalah *Tempo* atau *Femina,* tapi majalah yang berat-berat. Seminari hendaknya menanamkan mental pada anak didiknya, bahwa mereka hanyalah doktorandus, artinya orang yang senantiasa masih sedang dan mau belajar.

Keuskupan Agung Jakarta sendiri juga serius memikirkan kemungkinan *ongoing formation* itu bagi para imamnya. Sehubungan dengan ini

saya ingin, agar para imam senantiasa belajar melayani dan berdiri sederajat dengan anggota gereja lainnya. Kini gereja semakin dipandang sebagai keluarga besar, dan bukan sebagai piramida yang lancip. Memang kita semua setuju, bahwa gereja adalah keluarga Allah, keluarga besar, himpunan anak-anak Allah yang sama harkat dan martabatnya. Konsekuensinya, sungguh tidak tepat lagi jika imam memerintah dengan otoriter dan minta dilayani.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Hemat saya, soalnya bukan terletak pada sistem atau struktur tapi pada imamnya sendiri. Munculnya problem-problem organisatoris dalam gereja disebabkan oleh sikap imam yang tidak tahu diri. Seharusnya imam-imam, lebih-lebih mereka yang muda, harus tahu diri, bahwa secara manusiawi dan kodrati mereka belum mampu menduduki jabatan tertinggi dalam penggembalaan parokinya. Realita, maksud saya: umur, pengalaman, pengetahuan, belum memungkinkan mereka untuk menduduki jabatan itu. Tapi struktur gereja memaksa mereka untuk menduduki jabatan itu. Jadi sebenarnya ada kesenjangan antara realita dan stuktur. Jika mereka menyadari hal ini, mereka tentu akan rajin belajar dari pengalaman, terbuka terhadap mereka yang lebih berpengalaman, misalnya para pemuka jemaat dan anggota dewan paroki.

Saya sendiri berpendapat, tak perlu kita mengadakan perubahan struktur dalam pemerintahan dan organisasi jemaat. Struktur itu sendiri sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan, karena struktur itu mengandaikan, bahwa pastor sungguh-sungguh sudah matang untuk menduduki jabatannya. Lihat saja di negara-negara katolik, tidak mudah orang menjadi pastor kepala. Untuk itu dia membutuhkan waktu lama dan menempuh ujian segala. Di Indonesia hal ini tidak mungkin dilaksanakan, karena kekurangan pastor. Maka si pastor muda hendaknya tahu diri, untuk senantiasa belajar menjadi matang, jangan tiba-tiba merasa diri matang. Maklum, karena kebudayaan kita, umat sulit menyampaikan kritik, meski tidak puas dengan pastornya. Maka umat juga senang, jika pastornya tahu diri.

Terus terang, saya sendiri juga tidak tahu, mengapa kini muncul problem-problem, yang disebabkan oleh pastor muda. Umat mengeluh, banyak pastor muda yang otoriter. Saya sendiri pernah mempunyai pengalaman dalam formasi para calon imam. Di sana tak kurang-kurangnya kami menekankan mengenai kerendahan hati, pelayanan, jangan cari popularitas dan seterusnya. Dan mereka sendiri menunjukkan sikap bahwa mereka rela untuk tuntutan-tuntutan itu. Toh setelah jadi

imam, hal itu dilupakan begitu saja. Saya sungguh tak mengerti, mengapa?

Tanya: *Nampaknya kita sering dihadapkan pada jurang, yang memisahkan penghayatan dari tradisi ajaran. Ada orang yang hanya bisa berpegang pada bentuk-bentuk tradisional. Bagi lain orang, hidup iman itu melulu perasaan batin atau keterlibatan sosial. Apakah Bapak Uskup dan Monsignore mempunyai catatan tentang hipotesa kerja kami?*

Mgr. Leo Soekoto: Tegangan antara kelompok konservatif dan kelompok progresif selalu mewarnai sejarah sepanjang masa. Tugas kita, gembala dan umat adalah meyakinkan baik diri kita masing-masing maupun diri kita bersama, bahwa iman katolik mencakup baik perasaan batin maupun keterlibatan sosial. Hal itu bukanlah dualisme melainkan dua aspek dari satu kenyataan. Perasaan batin yang tidak meluap menjadi keterlibatan sosial bukanlah kristianisme melainkan *kwietisme*. Keterlibatan sosial tanpa keyakinan batin (kristiani) adalah humanisme belaka, bukan perjuangan kristiani.

Mgr. V. Kartosiswoyo: Idealnya, kita memang harus berpegang pada dan menegaskan ajaran gereja. Tapi sebagai gembala, kita juga harus memperhatikan situasi dan memaklumi kelemahan manusia. Situasi dan kelemahan manusia itu sering membuat kita tidak bisa menepati begitu saja ajaran gereja. Kita harus hidup dalam ketegangan itu. Di sanalah kita akan menemukan *sensus catholicus* kita. Jadi sebenarnya *sensus catholicus* itu masih dalam pencarian.

Bapak Uskup dan Monsignore terima kasih atas wawancara ini.

Wawancara ini dibuat oleh G.P. Sindhunata S.J.
Pertanyaan-pertanyaan wawancara disusun oleh G.P. Sindhunata S.J. dan Staf Redaksi